



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

Tahun Sidang : 2024-2025

Masa Persidangan : I

Rapat ke : 18 (delapan belas)

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum

Dengan : DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Rabu, 15 Januari 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara : Penyampaian Aspirasi Masyarakat Terkait Pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Rapat : H. Ahmad Safei, S.H., M.H./Anggota Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Lilis Suryani, S.E./Plt. Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX
DPR RI

Hadir : A. Anggota DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI
B. Pemerintah
- DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 100.2.24/20 dan sesuai arahan dari Pimpinan Komisi IX DPR RI. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dibuka pukul 10.50 WIB oleh Bapak H. Ahmad Safei, S.H., M.H. (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

Komisi IX DPR RI menerima masukan dari DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait aspirasi masyarakat mengenai Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI yaitu Badan Gizi Nasional (BGN).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.50 WIB.

Jakarta, 15 Januari 2025

KETUA RAPAT,



H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H.

A-255

**CATATAN AUDIENSI KOMISI IX DPR RI
DENGAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
15 JANUARI 2025**

I. CATATAN AUDIENSI

1. Beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini seperti:
 - a. Mekanisme MBG;
 - b. Anggaran MBG di daerah;
 - c. Petunjuk teknis pelaksanaan Program MBG;
 - d. Kapan akan dimulai Program MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Struktur organisasi Badan Gizi Nasional di daerah nanti seperti apa, karena apabila ada akan memudahkan DPRD untuk berkonsultasi terkait Program MBG ini.
3. Bagaimana terkait porsi penganggaran untuk masing-masing provinsi karena keadaan yang juga berbeda di masing-masing provinsi, terlebih di Provinsi Sulawesi Tenggara yang lebih banyak bahan makanan dari luar provinsi.
4. Adanya kekhawatiran akan naiknya harga bahan pangan karena imbas dari program MBG ini.

II. TANGGAPAN KOMISI IX DPR RI

Komisi IX DPR RI berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh **Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara** yang akan menjadi bahan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja.